

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya permintaan yang semakin meningkat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Informasi laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu (Larasati, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu : relevan, andal, dapat diperimbangkan, dan dapat dipahami. Kebutuhan mengenai keterandalan dalam penyampaian laporan keuangan telah dijelaskan dalam kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan bahwa keterandalan merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan, mengenai informasi yang telah tersaji dalam laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berisi tentang kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah masih terdapat adanya Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana mengecek ulang nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Kudus. Hal itu dilakukan karena terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kudus terkait dugaan jual beli jabatan. Ditemukan tiga nama yang dinyatakan lolos seleksi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama akan dicek ulang. Gubernur Jawa Tengah tunjuk pengganti Bupati Kudus yang terkena OTT KPK karena sebelumnya sudah ada *assessment* (penilaian), maka akan dilihat kembali tiga nama yang akan menduduki jabatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tercatat ada empat OPD yang jabatan kepala dinas masih kosong. Keempat OPD tersebut yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kudus. Dalam menentukan objektivitas dilakukan interview kembali. Terdapat 5 fakta terbaru OTT Bupati

Kudus untuk cicilan mobil pribadi hingga pernah menjadi tersangka korupsi. (Kompas.com).

Beberapa faktor yang mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Menurut Irawan (2018), pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap keterandalan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian selaras dan Nurdiansyah (2018), Kurniawati, dkk (2018) dan hasil dari Anshori (2018) mendapat hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pradana (2013) menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi seperti pemakaian komputer, *software* atau perangkat lunak dan lainnya yang sejenis belum digunakan secara maksimal.

Kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia memiliki kualitas yang tinggi apabila didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering menghadiri pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan sehingga dapat membantu menyelesaikan tugas dan menghasilkan

pelaporan keuangan yang andal (Irawan, 2018). Penelitian yang dilakukan Nurdiansyah (2018), Pradana (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian (Anshori, 2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan terganggu sehingga laporan keuangan tidak dapat dihasilkan secara tepat waktu.

Pengendalian intern merupakan salah satu yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi bertujuan untuk menyelamatkan kekayaan sebuah organisasi. Pengendalian intern juga sangat diperlukan bagi sebuah organisasi karena setiap perilaku para pegawai (individu) perlu dikendalikan agar tetap sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurdiansyah, 2018), (Pradana, 2013), dan (Kurniawati dkk, 2018) berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Komitmen organisasi menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang tinggi dapat menjadikan pegawai (individu) senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi yang dianggap sebagai sebuah kewajiban, sehingga komitmen organisasi akan membentuk perilaku individu yang senantiasa patuh terhadap peraturan – peraturan organisasi sehingga akan menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan (Endianto dkk, 2017) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian selaras dengan

(Dedi Irawan, 2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah melainkan faktor kapasitas sumber daya manusia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keterandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: pertama, penambahan variabel pengawasan keuangan daerah agar membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Perbedaan kedua, penelitian Irawan (2018) dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam bidang keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang akan meneliti masalah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten kudos, agar tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas maka penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu :

1. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengawasan keuangan daerah dan variabel dependen keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Objek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya Penelitian mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk menguji Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan, berkaitan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern, komitmen organisasi, dan

pengawasan keuangan daerah, terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Institusi Pemerintah di Kabupaten Kudus diharapkan dapat menjadi penilaian untuk membantu pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai petunjuk atau referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

c. Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama

b. Mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori yang sudah digunakan dipelaksanaan sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.